

HUBUNGAN INDONESIA-AMERIKA SERIKAT PASCA KEMENANGAN PARTAI DEMOKRAT

Oleh:

Yanyan Mochamad Yani

Luar biasa..! Itulah kata yang kiranya tepat untuk menunjukkan hiruk pikuknya suasana pemilihan umum presiden di Amerika Serikat (AS). Betapa tidak, selama hampir dua tahun warga AS terlibat secara aktif untuk memilih pemenang dari pesta demokrasi akbar itu. Setelah muncul figur Barrack Obama dari Partai Demokrat dan John McCain dari Partai Republik, episode proses demokrasi pemilu di AS ini mencapai puncaknya tanggal 4 November yang lalu, dan pemenangnya adalah pasangan dari Partai Demokrat Obama dan Biden.

Hasil pemilihan umum di Amerika Serikat beberapa hari lalu juga menunjukkan bahwa Partai Demokrat meraih kemenangan besar dengan menguasai mayoritas kursi senat. Itu berarti bahwa dua pilar kekuasaan dalam perpolitikan AS – DPR dan Senat dikuasai oleh Partai Demokrat. Dengan kata lain, kini kepemimpinan nasional di AS baik dari kalangan eksekutif dan juga dari kalangan legislatif secara bersama-sama (bipartisan) berada dalam kendali Partai Demokrat..

Dari hasil pemilihan umum kali ini juga muncul kepermukaan opini publik di kalangan pemilih. Publik menganggap bahwa sudah saatnya AS mengadakan perubahan (*change*). Perubahan dalam artian menuju ke arah yang lebih baik tidak hanya bagi Amerika Serikat tetapi juga bagi dunia.

Paling tidak, harapan baru muncul. Wajah garang kebijakan luar negeri unilateral dengan menggunakan instrumen militer yang kerap ditampilkan AS kepada negara-negara lain, khususnya negara berkembang tampaknya akan perlahan-lahan berkurang. Hal itu juga terutama sepanjang sejarah AS Partai Demokrat kerap lebih mengedepankan kampanye hak-hak asasi manusia, keamanan di bidang ekonomi dalam negeri serta juga menangani permasalahan-permasalahan ekonomi internasional. Partai Demokrat “tidak ambisius” menekankan pentingnya persaingan antar kekuatan dunia (*world powers*) dalam artian persaingan bernuansa militer.

Kebijakan Luar Negeri AS

Namun, dalam kaitannya dengan kebijakan luar negeri AS, siapapun juga pemenang pemilihan presiden AS baik dari Partai Demokrat maupun Partai Republik, dengan adanya struktur pembuatan kebijakan luar negeri AS yang berpusat banyak (*multi centers of decision making*) dewasa ini tidaklah mungkin terjadi perubahan-perubahan yang drastis.

Derap pemerintahan AS yang kini didominasi Partai Demokrat dalam penyesuaian diri pada tantangan-tantangan internasional yang baru dan sedang berlangsung tidak akan lebih cepat daripada publik mencapai konsensus. Partai Demokrat masih perlu menggerakkan dan mengorganisasikan dukungan lebih lanjut dari publiknya dan dari Kongres. Untuk itu perlu ada perumusan yang lebih jelas dan lebih terperinci mengenai kepentingan AS di berbagai belahan dunia, khususnya di kawasan Asia-Pasifik.

Hubungan AS - Indonesia

Khususnya tentang Indonesia, dalam kerangka *grand strategy*, AS akan tetap mempertimbangkan beberapa hal penting. *Pertama*, Indonesia dianggap sebagai negara yang secara geografis sangat strategis bagi kepentingan AS. Misalnya saja beberapa tahun lalu ada keinginan kuat dari AS untuk memperoleh pijakan baru di Indonesia sebagai substitusi gerak strategis AS menghadapi tantangan baru ancaman non-konvensional. *Kedua*, Indonesia yang telah memasuki tahapan demokrasi yang cukup matang adalah modal utama bagi AS untuk mengadakan kontak kelembagaan yang dapat menyebabkan meluasnya pengaruh AS di Indonesia, khususnya di tataran elit kekuasaan.

Ketiga, sebagai negara mayoritas Muslim terbesar, Indonesia adalah mitra yang tidak mungkin dikesampingkan terutama dalam upaya pemerintahan Barack Obama untuk menghapus citra kurang baik AS di kalangan negara-negara berpenduduk muslim dalam perang global melawan terorisme. *Keempat*, walaupun belum sepenuhnya pulih, AS memandang ekonomi yang stabil dan kokoh akan menjadi jalan bagi terus berlangsungnya hubungan asimetris dolarisasi yakni makin kuatnya cengkeraman dolar AS dalam transaksi perdagangan internasional serta terbukanya pasar Indonesia bagi ekspor barang-barang dengan teknologi tinggi AS di era *free trade area*.

Keempat faktor di atas merupakan hasil kalkulasi strategis AS terhadap Indonesia. Fakta menunjukkan bahwa AS lebih mendominasi dalam interaksi hubungan bilateral kedua negara selama ini. Lalu, apa yang bisa dilakukan Indonesia di era berkuasanya Partai Demokrat dalam pemerintahan AS?.

Tampilnya Partai Demokrat yang mengedepankan humanisme dalam politik luar negeri AS akan membuka peluang implementasi yang lebih dari sekedar penggelaran kekuatan militer ofensif di berbagai kawasan dunia. Misalnya, dalam kaitannya dengan perang global melawan terorisme dan perselisihan dengan negara-negara yang tidak sepaham dengan AS tampaknya akan lebih banyak diupayakan melalui jalur forum multilateral. Jadi, tidak bersifat kebijakan luar negeri unilateal yang selama delapan tahun terakhir ini diterapkan pemerintahan AS di bawah kepemimpinan George W. Bush Jr.

Namun, di lain pihak Partai Demokrat juga kerap lebih mengedepankan penghargaan dan pelaksanaan Hak Asasi Manusia serta ketaatan akan hukum internasional. Itu berarti untuk negara-negara berkembang termasuk Indonesia, kemungkinan akan terdapat makin dalamnya campur tangan AS pada masalah dalam negeri Indonesia. Titik api (*flashing point*) ke arah itu sudah ada yakni masuknya masalah Papua yang diajukan oleh salah satu Senator dari Partai Demokrat dalam agenda Kongres AS beberapa waktu lalu, walaupun pada akhirnya agenda tersebut ditunda pembahasannya. Adanya move politik yang memajukan dirinya sebagai Kaukus Parlemen Internasional tampaknya membuka peluang luka lama masalah Papua akan tertoreh kembali.

Kemudian, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa dalam bidang ekonomi, AS masih merupakan pasar yang penting bagi produk Indonesia dan merupakan salah satu donor utama bagi pembangunan Indonesia. Tidak dapat disangkal bahwa AS masih mendominasi lembaga-lembaga pembangunan dan keuangan internasional seperti Bank Dunia dan IMF. Secara demikian, adalah suatu keharusan buat Indonesia untuk terus menjalin hubungan dengan AS walaupun secara empirik bersifat asimetris dalam artian ketergantungan Indonesia kepada AS jauh lebih besar daripada ketergantungan AS terhadap Indonesia. Memang,

Namun, besarnya kesenjangan tingkat penguasaan teknologi menyebabkan lemahnya kesetaraan dalam perdagangan bilateral. Karena itu, secara bijak Indonesia perlu makin memperkuat hubungannya dengan kekuatan-kekuatan lain di kawasan, seperti Rusia, China, India, dan Uni Eropa melalui kerangka kerjasama intra maupun ekstra kawasan. Jadi, paling tidak Indonesia memiliki dua front dalam menghadapi AS baik sebagai mitra bilateral maupun AS sebagai kekuatan kawasan Amerika Utara (NAFTA).

Kemudian, Indonesia harus lebih intensif membangun bentuk hubungan yang lebih kokoh dengan negara selain AS, dan meninggalkan pola ketergantungan Indonesia pada AS khususnya dalam bidang pertahanan-keamanan. Kita mafhum bahwa pemberlakuan embargo militer AS terhadap Indonesia sejak tahun 1990 an terjadi atas desakan kuat dari elit-elit

Partai Demokrat yang disebabkan adanya anggapan pelanggaran HAM oleh militer Indonesia saat itu.

Pada titiki ini, perkembangan politik kontemporer dengan dominannya Partai Demokrat di dalam pemerintahan AS kiranya perlu dicermati dan dikaji secara seksama oleh para elit pemerintahan di Indonesia. Paling tidak, generasi pemimpin nasional Indonesia dewasa ini harus mempunyai kepercayaan, dan menjaga harkat dan jati diri bangsa dalam membangun hubungan yang konstruktif dengan AS, “*cooperation where we can; disagreement where we must*”. ***

=====
**Penulis adalah Dosen Jurusan Hubungan Internasional dan Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran.**